

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim penguji Tugas Akhir Progrm Studi Akuntansi (DIII)

sebagai salah satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :

FITRIA EKA SARI

NIM : 1109131

PRGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

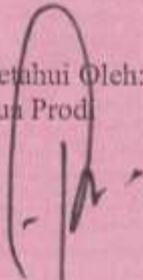
2015

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

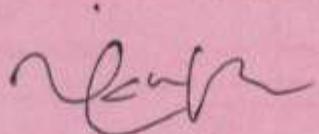
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

Nama : Fitria Eka Sari
NIM : 1109131
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh:
Ketua Prodi


Perengki Susanto SE,M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Padang, Januari 2015
Disetujui Oleh:
Pembimbing


Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

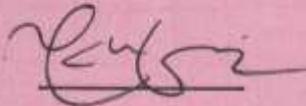
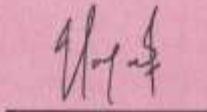
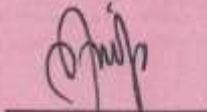
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

Nama : Fitria Eka Sari
NIM/BP : 1109131/2011
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Pembimbing)	
2. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Penguji I)	
3. Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc	(Penguji II)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Eka Sari
Thn. Masuk/NIM : 2011/1109131
Tempat/Tgl. Lahir : Pekan Baru/20 April 1992
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Kakak Tua No 1 B Air Tawar Barat, Padang.
Judul Tugas Akhir : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
Hp : 085766599605

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015

Yang menyatakan,



Fitria Eka Sari

BP/NIM. 2011/1109131

ABSTRAK

FitriaEka Sari. 1109131. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pendapatan daerah kota Padang, tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang, tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Padang, serta tingkat kemandirian lingkungan daerah kota Padang.

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data mentah yang digunakan dalam penelitian ini adalah LRA pemerintah kota Padang tahun 2009-2013. Dengan hasil perhitungan yang diperoleh berupa tingkat persentase maka dapat dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan beberapa rasio, diperoleh informasi bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan belanja daerah berfluktuasi dari tahun 2009-2013, derajat desentralisasi kota Padang berfluktuasi tiap tahunnya, ketergantungan keuangan pemerintah daerah kota Padang masih relative tinggi dari tahun 2009-2013. Sementara tingkat kemandirian daerah kota Padang masih tergolong rendah meskipun dari tahun 2009-2010 persentase mengalami penurunan, tahun 2011-2013 peningkatan terjadi kembali yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebaiknya pemerintah kota Padang meningkatkan pengelolaan PAD dan menggali objek-objek yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Laporan Keuangan, Analisis Rasio.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2013**”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pembimbing Halkadri Fitra, SE, MM, Ak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesai tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak/Ibu penguji yang telah meluangkan waktu, serta ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta seluruh karyawan dan Staf Adm.
5. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan materil.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas, maka untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan tugas akhir ini sangat penulis harapkan.

Harapan penulis semoga karya tulis ini memberi arti dan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat usaha ini sebagai amal kebaikan kepada kita semua Aamiin.

Padang, Januari 2015

Fitria Eka Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Laporan keuangan	9
B. Komponen laporan keuangan daerah	9
1. Laporan realisasi anggaran	9
2. Neraca	10
3. Laporan arus skas	10
4. Catatan atas laporan keunagan	11
C. Komponen neraca	11
1. Aset	11
2. Kewajiban	13
3. Ekuitas dana	13
D. Komponen Laporan Realisasi Anggaran	14
1. Pendapatan	15
2. Belanja	18
E. Analisis Laporan Keuangan	20
F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
G. Tujuan Laporan Keuangan	21
H. Ketergantungan Keuangan	24
I. Analisis pertumbuhan pendapatan	26
J. Analisis Rasio Keuangan Daerah	26
1. Derajat desentralisasi	26
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah	27
3. Rasio kemandirian keuangan daerah	28
K. Analisis Pertumbuhan pendapatan	29
BAB III. PENDEKATAN PENELITIAN	30
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Rancangan Penelitian	30
1. Jenis penelitian	30
2. Objek penelitian	31
3. Sumber Data	31

4. Teknik Analisis Data	32
BAB IV. PEMBAHASAN	34
A. Profil Instansi	34
1. Sejarah berdiri DPKA.....	34
2. Visi Misi DPKA	34
3. Tugas pokok dan fungsi DPKA.....	35
4. Struktur Organisasi DPKA	36
5. Tugas pokok dan fungsi bidang.....	38
a. Sekretariat	38
b. Bidang Pendapatan	43
c. Bidang Pengendalian.....	46
d. Bidang Anggaran	50
e. Bidang Aset.....	56
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	61
g. Bidang Perbendaharaan.....	64
B. Pembahasan.....	69
1. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah	69
2. Analisis pertumbuhan belanja daerah.....	71
3. Derajat desentralisasi daerah	72
4. Ketergantungan keuangan daerah.....	74
5. Kemandirian keuangan daerah	77
BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan keuangan Pemerintah Kota Padang 2009 – 2013	4
Tabel 2.2. Skala interval derajat desentralisasi	27
Tabel 2.3. Tingkat kemampuan daerah	27
Tabel 2.4. Tingkat kemandirian daerah.....	28
Tabel 4.5. Pendapatan daerah kota Padang 2009 - 2013.....	75
Tabel 4.6. Pendapatan daerah kota Padang 2009 - 2013.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4. Struktur organisasi DPKA kota Padang	36
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Laporan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2009-2013.
- Lampiran 2.** Surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Lampiran 3.** Surat rekomendasi dari Kesbangpol untuk melakukan penelitian di DPKA kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada *stakeholder* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin di dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan keuangan ini dilakukan setelah adanya laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan batasan waktu dua bulan anggaran berakhir (M. Yusuf, 2010:1)

Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada suatu perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut.

Dalam memenuhi akuntabilitas, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Wujud dari pelaporan kinerja pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Menurut PP No 24 Tahun 2005 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan perkembangan daerah, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber dana daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembangian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembangian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam.

Namun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Analisis laporan keuangan Kota Padang dari tahun 2009-2013 dapat digambarkan pada table berikut :

Tabel 1.1.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang
Tahun 2009-2013

Laporan keuangan	2009	2010	2011	2012	2013
Aset	Rp 2.885.510.912.886,27	Rp 2.978.473.678.676,08	Rp 3.181.983.232.782,10	Rp 3.867.900.182.288,62	Rp 5.226.920.846.794,02
Hutang	Rp 4.339.856.417,00	Rp 4.154.698.059,42	Rp 4.816.871.875,42	Rp 7.706.334.552,64	Rp 7.546.428.052,31
Ekuitas	Rp 2.881.171.056.469,27	Rp 2.974.318.980.616,66	Rp 3.177.166.360.906,68	Rp 3.860.193.847.735,98	Rp 5.219.374.418.741,71
Pendapatan	Rp 957.275.976.959,10	Rp 1.040.019.734.777,01	Rp 1.236.072.228.184,66	Rp 1.475.988.121.513,30	Rp 1.745.733.053.161,00
Belanja	Rp 996.418.374.351,00	Rp 1.100.368.159.523,00	Rp 1.180.346.196.899,00	Rp 1.400.212.397.096,25	Rp 1.875.768.690.217,86

Sumber : DPKA kota Padang tahun 2009-2013

Berdasarkan laporan keuangan daerah kota Padang 2009-2013 mengalami peningkatan tiap tahun. Dimana tahun 2009 aset kota Padang mencapai Rp 2.885.510.912.886,27. Tahun 2010 aset daerah kota Padang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan sebesar Rp 92.962.765.789,81 menjadi Rp 2.978.473.678.676,08. Kemudian tahun 2011 aset daerah kota Padang mencapai Rp 3.181.983.232.782,10, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 203.409.554.106,92. Pada tahun 2012 aset kota

Padang yaitu Rp 3.867.900.182.288.62, lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan asset tahun 2012 sebesar Rp 685.926.949.506,52. Sedangkan tahun 2013 aset nya mencapai Rp 5.226.920.846.794,02. Peningkatan tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.359.020.664.505,40. Selanjutnya hutang daerah kota Padang yaitu tahun 2009 mencapai Rp 4.339.856.417.00, tahun 2010 hutang daerah kota Padang menurun sebesar Rp 185.158.357,6 menjadi Rp 4.154.698.059.42. Pada tahun 2011 hutang meningkat sebesar Rp 662.173.816 menjadi Rp 4.816.871.875.42, sementara tahun 2012 hutang lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.706.334.552.64, peningkatan mencapai Rp 2.889.462.677. Dan tahun 2013 hutang menurun menjadi Rp 7.546.428.052.31. Hutang pada daerah kota Padang mengalami fluktuasi. Selanjutnya Ekuitas pada tahun 2009 sebesar Rp 2.881.171.056.469.27, meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp 2.974.318.980.616.66, tahun 2011 ekuitas dana kota Padang yaitu Rp 3.177.166.360.906.68, meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 ekuitas dana meningkat sebesar Rp 3.860.193.847.735.98, dan tahun 2013 mencapai Rp 5.219.374.418.741.71, peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya. Pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 957,275,976,959.10, tahun 2010 pendapatan daerah kota Padang mengalami peningkatan sebesar Rp 1.040.019.734.777.01, tahun 2011 mengalami peningkatan kembali yaitu Rp 1,236,072,228,184,66, tahun 2012 peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya mencapai Rp 1,475,988,121,513,30, dan

tahun 2013 mencapai Rp 1.745.733.053.161,00. Belanja daerah tahun 2009, Rp 996.418.374.351,00. Tahun 2010 belanja daerah meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp 1.100.368.159.523. Tahun 2011 belanja daerah meningkat sebesar Rp 1.180.346.196.899,00. Belanja daerah tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai Rp 1.400.212.397.096,25. Peningkatan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2013 belanja daerah kota Padang lebih meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1.875.768.690.217,86.

Dengan adanya laporan keuangan, pengguna laporan keuangan dapat melihat berbagai perkembangan suatu daerah. Sehubungan dengan banyaknya sumber informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dan agar penelitian ini terfokus, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendapatan daerah kota Padang ?
- b. Bagaimana tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang ?
- c. Bagaimana derajat Desentralisasi daerah kota Padang?
- d. Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Padang ?
- e. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja daerah kota Padang.
- c. Untuk mengetahui derajat desentralisasi daerah kota Padang.
- d. Untuk mengetahui ketergantungan keuangan daerah kota Padang terhadap pemerintah pusat.
- e. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk penulis
Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait perkembangan daerah kota Padang dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- b. Untuk Perusahaan
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah kota Padang jika dilihat menggunakan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belaja, derajat desentralisasi,

rasio ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan keuangan

Menurut Hans Kartikahadi (2012:118) Laporan keuangan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.

Sementara menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (PP No 71 Tahun 2010).

B. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok menurut Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 2005 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Sedangkan menurut PSAP 02 Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang

menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Menurut Dr. Kasmir (2013 : 30), neraca adalah salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu ringkasan posisi Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan sebuah organisasi pada satu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Informasi tentang kas dan setara kas serta arus penerimaan dan penggunaan dana kas dan setara kas adalah informasi yang sangat penting dan berguna untuk dilaporkan kepada dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

C. Komponen Neraca

Menurut Mahmudi (2007 : 63) Komponen neraca terdiri dari :

1. Aset

Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomik yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa datang.

Aset diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu :

- 1) Aset lancar.
 - a. Kas dan setara kas.
 - b. Investasi jangka pendek.
 - c. Piutang.
 - d. Persediaan.
- 2) Investasi jangka panjang.
 - a. Investasi nonpermanen.
 - b. Investasi permanen.
- 3) Aset tetap.

Aset tetap meliputi :

 - a. Tanah.
 - b. Peralatan dan mesin.
 - c. Gedung dan bangunan.
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - e. Konstruksi dalam pengerjaan.
 - f. Akumulasi penyusutan.
- 4) Aset lainnya

Aset lainnya meliputi :

 - a. Tagihan penjualan Angsuran.
 - b. Tuntutan Perbendaharaan.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi.
 - d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
 - e. Aset Tak Berwujud

f. Aset lain-lainnya.

2. Kewajiban

Kewajiban memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah (Mahmudi, 2007 : 66).

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua :

1) Kewajiban jangka pendek.

Kewajiban jangka pendek meliputi :

- a. Utang transfer.
- b. Utang gaji pada pegawai.
- c. Utang bank.

2) Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang meliputi :

- a. Utang jangka panjang pada pemerintah pusat.
- b. Utang jangka panjang kepada pemerintah daerah lainnya.
- c. Obligasi pemerintah daerah.

3. Ekuitas Dana

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas dan didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1) Ekuitas dana lancar.

Ekuitas dana lancar meliputi :

- a. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
- b. Pendapatan Ditangguhkan.
- c. Cadangan Piutang.
- d. Cadangan Persediaan.
- e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

2) Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana investasi meliputi :

- a. Dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
- b. Dana diinvestasikan dalam aset tetap.
- c. Dana diinvestasikan dalam aset lainnya.
- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

3) Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan meliputi :

- a. Dana diinvestasikan dalam dana cadangan pembangunan infra struktur.
- b. Dana diinvestasikan dalam dana cadangan investasi permanen.

D. Komponen Laporan Realisasi Anggaran

Komponen laporan realisasi anggaran menurut Mahmudi (2007 : 68)

terdiridari :

1. Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Mahmudi : 2007 :121).

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU. No. 33 Tahun 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah bersumber :

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2) Retribusi daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang sah.

Yang termasuk lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi hasil.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak berupa pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pph Pasal 21. Sementara dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam seperti yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambang minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keungan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah, dan

alokasi dasar yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

3) Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan diperoleh dari hibah dan dana darurat. Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahan Negara asing. Badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sementara dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2. Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

a. Belanja operasi

Belanja operasi meliputi :

1. Belanja pegawai.
2. Belanja barang.
3. Bunga.
4. Subsidi.
5. Hibah.
6. Bantuan sosial.

b. Belanja modal

belanja modal meliputi :

1. Belanja tanah.
2. Belanja peralatan dan mesin.
3. Belanja gedung dan bangunan.

c. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga meliputi :

1. Bantuan bencana alam.
2. Bantuan bencana sosial.
3. Bantuan korban politik.

E. Analisis laporan keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan serta untuk menilai kinerja keuangan di masa depan (Sofian Syafri Harapan :1998:190).

Sementara menurut Soemarso (2006:430), analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena.

F. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada *stakeholder* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin di dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan keuangan ini dilakukan setelah adanya laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan batasan waktu dua bulan anggaran berakhir. Laporan tersebut meliputi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan dan Neraca SKPD (M.Yusuf : 2010:1).

Sementara menurut Indra Bastian (2006:388) laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik dimana tujuan

umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna (*wide range user*) guna membuat dan mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai oleh suatu entitas dalam mencapai tujuannya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dimana yang dimaksud dengan kebutuhan memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (SAP PP No 24 Thun 2005)

G. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut PP No 24 Tahun 2005, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, relisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporn atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sementara menurut Mardiasmo (2010:125) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik :

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

- b. Akuntabilitas Data dan Pelaporan (*Accountability and Restrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk kerja dan mengavaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

- c. Perencanaan dan informasi otorisasi (*Planning and Authorization Information*) laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.
- d. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

- e. Hubungan masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi

yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber data dan fakta (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

H. Ketergantungan Keuangan

Menurut Kuncoro (2004:8), ketergantungan fiskal disebabkan oleh :

1. Rendahnya PAD

Untuk meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi, (2010:18) semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Pada prinsipnya, semakin tinggi sumbangan PAD terhadap APBD, maka dapat menunjukkan bahwa semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat.

Menurut Kuncoro (2004:13) rendahnya PAD disebabkan oleh :

- a. Kurang berperan perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

- b. Tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak yang paling produktif dan *buoyant*, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun tidak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan (termasuk migas), Pajak Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan), semua dikelola secara administratif dan ditentukan tarif oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antara daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman perpajakan.
 - c. Pajak daerah yang cukup beragam.
 - d. Bersifat polotis dimana ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong disintegrasi dan separatisme.
 - e. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Dominannya Transfer dari Pemerintah.

Subsidi atau transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah menggunakan tiga jalur :

- a. Subsidi Daerah Otonom (SDO) yaitu transfer kepada Pemda untuk membiayai pengeluaran rutin.

- b. Program Inpres baik yang bersifat sektoral maupun umum dan digunakan untuk membantu pemda (provinsi, kabupaten/kota madya, desa), untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi keseimbangan struktur keuangan antara daerah.
- c. Pengeluaran sektoral yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek/pengeluaran pembangunan. Sebagai perwujudan mekanisme dekonsentrasi.

I. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif (Mahmudi : 2007 : 146).

Pertumbuhan Pendapatan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan pendapatan } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{pendapatan Th } t-1}{\text{Pendapatan Th } t} \times 100 \%$$

J. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007:128), analisis keuangan daerah terdiri :

a) Derajat Desentralisi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Munir, skala interval derajat desentralisasi digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Skala Interval Derajat Desentralisasi

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
< 10.00	sangat kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
> 50.00	sangat baik

Sumber : Munir, 2004 : 106

b) Rasio ketergantungan Keuangan daerah

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Sanusi Fattah, skala interval untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Tingkat Kemampuan Daerah

kemampuan/Ketergantungan Keuangan	persentase
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : Penelitian Sanusi Fattah, U.Hasanuddin

c) Rasio kemandirian Keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjam (Widodo, 2001 :262)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapataan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Sanusi Fattah, skala interval untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Tingkat Kemandirian Daerah

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	sangat baik

Sumber : Penelitian Sanusi Fattah, U.Hasanuddin

K. Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi : 2007 : 141).

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan terkait perkembangan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan pemerintah kota Padang, dapat disimpulkan :

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah kota Padang tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009-2010 persentase pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 8,64%. Sedangkan tahun 2010-2011 persentase pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 18,85%. Tahun 201-2012 persentase menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,25%. Sementara tahun 2012-2013 persentase pertumbuhan pendapatan menurun mencapai 16,18%.
2. Tingkat pertumbuhan belanja daerah dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan belanja tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Pertumbuhan belanja daerah kota Padang tiap tahunnya mengalami fluaktasi, sama hal nya dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Dimana pertumbuhan belanja daerah tahun 2009–2010 persentase mecapai 10,43%. Tahun 2010–2011 menurun

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pertumbuhan belanja daerah mencapai 7,27%. Pada tahun 2011–2012 terjadi peningkatan, dimana persentase pertumbuhan belanja daerah sebesar 18,62%. Sementara tahun 2012–2013 persentase menurun sebesar 15,67%.

3. Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 dan 2010 persentase derajat desentralisasi menurun. Dimana persentase pada tahun 2009 mencapai 11,83% dan tahun 2010 menurun yaitu 11,22%. Sementara pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 persentase derajat desentralisasi meningkat tiap tahunnya. Tahun 2011 mencapai 12,13%, tahun 2012 sebesar 12,83%, dan tahun 2013 mencapai 13,93%. Jika dilihat dari skala derajat desentralisasi kemampuan keuangan daerah masih tergolong kurang
4. Pemerintah kota Padang masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, hal ini dapat diketahui pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009-2013 dimana pendapatan transfer dari pusat berupa dana perimbangan atau pendapatan lainnya dan pendapatan transfer dari provinsi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tingkat ketergantungan keuangan daerah tahun 2009-2012 meningkat tiap tahun. Dimana persentase mencapai 82,90% tahun 2009, 83,28% tahun 2010, 85,50% tahun 2011 dan 87,10% tahun 2012. Sementara tahun 2013 persentase menurun dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, yaitu 85,70%. Sedangkan tingkat kemampuan keuangan daerah ketergantungan keuangan daerah sudah tergolong tinggi.

5. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Padang tahun 2009-2013 masih tergolong rendah, karena persentase dari rasio tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Dimana tahun 2009 persentase tingkat kemandirian keuangan daerah mencapai 14,27%, sedangkan tahun 2010, persentase menurun sebesar 13,47%. Tahun 2011, 2012 dan 2013 persentase meningkat tiap tahun, dimana tahun 2011 mencapai 14,18% . Tahun 2012 yaitu 14,74% dan tahun 2013 mencapai 16,69%. Dilihat dari tingkat kemampuan daerah kemandirian keuangan daerah tergolong kurang. Persentase antara 10,01%-20,00%. Meskipun pemerintah kota Padang telah mengalami peningkatan jumlah PAD, namun jumlah pendapatan transfer dan pinjaman daerah mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun ketahun, tanpa menimbang pada batasan interval suatu daerah dikatakan mempunyai kemandirian yang baik, tingkat kemandirian daerah kota Padang telah mengalami perubahan yang positif meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan atau pun mencolok.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka untuk pemerintah Kota Padang supaya dapat menggali lagi potensi-potensi di daerah Kota Padang yang nantinya bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Padang sehingga dapat lebih meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Padang yang juga berarti dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal Kota Padang.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai efisiensi PAD Kota Padang dan Pajak Daerah Kota Padang. Selain hal itu, penulis juga memberikan saran untuk melakukan penelitian mengenai asset dan liabilitas Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- IKAPI, A. (2003). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Fokusmedia.
- Indra Bastian SE Akt, M. P. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Kartikahadi, H. (2012). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Unit Penerbitan Dan Percetakan STIM YKPN.
- Mahmudi.(2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- KuncoroMudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Standar Akuntansi Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang penyajian laporan keuangan
- UU.No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

No	Uraian	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
I	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Daerah	75.854.256.630,00	77.639.340.556,00	102,35	71.666.752.249,00
	Retribusi Daerah	27.066.516.238,00	21.985.780.440,00	81,23	21.434.604.840,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	5.293.729.120,00	5.293.729.120,00	100,00	4.741.733.453,07
	Lain-lain PAD yang Sah	12.211.790.352,93	11.772.453.720,88	92,83	15.011.619.957,76
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	120.926.292.740,93	116.691.283.836,95	96,50	113.294.710.308,83
B	PENDAPATAN TRANSFER				
1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
	Bagi Hasil Pajak	42.626.594.000,00	64.983.532.757,00	152,45	58.019.544.036,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	901.770.000,00	426.165.989,00	47,26	863.293.468,00
	Dana Alokasi Umum	632.117.457.000,00	632.117.457.000,00	100,00	628.472.618.000,00
	Dana Alokasi Khusus	47.513.500.000,00	47.513.500.000,00	100,00	43.463.000.000,00
	Sub Jumlah	1.123.958.271.000,00	1.191.040.487.746,00	105,94	1.133.818.655.504,00
2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
	Dana Perencanaan	81.174.845.544,00	79.075.689.200,00	97,44	21.493.518.000,00
	Sub Jumlah	81.174.845.544,00	79.075.689.200,00	97,44	21.493.518.000,00
3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.918.387.768,00	46.004.499.690,00	112,43	39.288.455.945,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	40.918.387.768,00	46.004.499.690,00	112,43	39.288.455.945,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.205.147.463.312,00	1.216.140.676.136,00	100,90	1.174.810.479.449,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	17.634.941.829,99	7.761.149.718,06	44,01	14.350.439.708,27
	Pendapatan Dana Darurat	2.225.250.000,00	2.225.250.000,00	100,00	33.471.114.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	23.308.400.000,00	23.368.690.000,00	99,87	0,00
	DPOF dan PPO	24.633.683.095,00	22.190.116.586,00	90,00	0,00
	DPIP	3.868.000.000,00	3.740.000.000,00	97,00	0,00
	DPIP	1.000.000.000,00	900.000.000,00	90,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.399.203.203,00
	Jumlah	71.702.276.924,99	57.185.866.304,06	79,67	50.420.837.001,27
	JUMLAH PENDAPATAN	1.833.963.892.977,88	1.840.019.734.777,01	100,59	1.677.278.676.969,10
II	BELANJA				
A	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	774.300.166.763,03	753.001.463.938,00	97,25	641.585.602.019,00
	Belanja Barang	145.869.306.001,39	130.670.689.746,90	89,58	143.715.077.251,00
	Biaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hibah	32.479.721.382,00	24.862.169.054,00	76,55	32.740.044.500,00
	Bantuan Sosial	14.599.008.819,00	12.168.799.800,00	80,20	13.343.255.708,00
	Bantuan Keuangan	42.701.816.766,00	20.188.432.181,00	47,27	33.825.179.566,00
	Jumlah	1.009.856.819.731,44	960.891.134.739,60	95,14	847.116.067.133,00
B	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	26.170.895.933,00	23.281.514.262,00	90,11	16.412.658.072,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	14.629.184.677,17	14.479.047.862,00	98,97	23.425.578.582,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	79.530.352.044,00	47.611.627.421,00	59,61	25.983.155.400,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.711.665.447,51	48.434.344.839,00	97,43	33.710.613.825,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	209.270.000,00	198.349.600,00	94,78	800.183.050,00
	Belanja Aset Lainnya	288.496.000,00	131.640.000,00	45,62	0,00
	Jumlah	178.539.064.181,68	154.235.834.084,00	87,71	100.332.186.929,00
C	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	5.445.645.800,00	5.241.000.000,00	96,24	28.356.124.289,00
	Jumlah	5.445.645.800,00	5.241.000.000,00	96,24	28.356.124.289,00
	JUMLAH BELANJA	1.189.934.729.633,12	1.108.368.189.523,60	92,78	996.418.374.351,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2009
III	TRANSFER				
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.185.934.739.433,12	1.100.348.139.623,80	92,78	996.418.374.351,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.971.435.455,34)	(68.348.404.745,99)	29,71	(151.441.897.391,96)
IV	PEMBIAYAAN				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SLPA	107.348.295.909,24	107.348.295.909,24	100,00	137.097.763.438,14
	Pencanaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penyajian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	45.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Permintaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	152.348.295.909,24	107.348.295.909,24	70,48	137.097.763.438,14
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perencanaan Modal Perm. Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	373.489.778,00
	Perbay. Pokok Pinj. DN Lainnya	76.660.254,00	76.660.254,00	100,00	18.229.380.220,00
	Perbay. Pokok Pinj. DN Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	376.660.254,00	76.660.254,00	20,33	18.607.070.137,00
	PEMBIAYAAN NETTO	181.971.435.455,34	107.271.435.455,34	70,99	148.490.693.301,14
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)	(9,00)	46.923.218.968,25		197.348.295.909,24

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

URAIAN	TAHUN 2010 (Rp.)	TAHUN 2009 (Rp.)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI		
1. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pajak Daerah	77.639.346.556,00	71.666.752.249,00
Pendapatan Retribusi Daerah	21.985.780.440,00	21.834.604.849,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.295.729.120,00	4.741.733.453,07
Lain-lain P.A.D. Yang Syah	11.772.433.720,95	13.011.619.951,76
Dana Bagi Hasil Pajak	64.985.132.757,00	58.019.544.036,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	436.165.989,00	963.293.468,00
Dana Alokasi Umum	632.117.457.000,00	628.472.618.000,00
Dana Alokasi Khusus	43.515.500.000,00	45.463.000.000,00
Dana Penyetoran	39.093.689.200,00	21.493.518.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.004.499.690,00	39.238.455.945,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	3.761.149.718,06	14.530.459.708,27
Pendapatan Dana Darurat	3.225.250.000,00	33.471.114.600,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi	22.368.690.000,00	0,00
DPPD dan PPD	22.190.116.386,00	0,00
DPPD	1.740.600.000,00	0,00
DPPD	900.000.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	2.399.283.293,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.040.015.734.777,01	957.276.976.958,18
2. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	753.801.463.938,00	641.585.082.019,00
Belanja Barang	130.670.089.746,00	145.915.497.251,00
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	24.862.169.054,00	32.740.446.100,00
Bantuan Sosial	13.168.399.800,00	11.343.235.798,00
Bantuan Keuangan	39.188.412.181,00	33.825.179.965,00
Belanja Tak Terduga	5.241.090.800,00	28.536.126.389,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	966.122.225.519,00	896.866.187.422,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	73.893.509.258,01	61.209.789.537,18
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pengjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Pengjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Pengjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Pengjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Pengjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	23.381.514.262,00	16.432.656.072,00
Belanja Peralatan dan Mesin	14.479.047.862,00	23.425.578.382,00
Belanja Gedung dan Bangunan	47.411.637.421,00	25.983.155.400,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.434.344.859,00	33.710.613.825,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	198.349.600,00	800.183.050,00
Belanja Aset Lainnya	131.040.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	134.235.934.064,00	100.352.186.729,00
Arus Kas Bersih dari Akt. Invest. Aset Non Kes.	(134.235.934.064,00)	(100.352.186.729,00)

URAIAN	TAHUN 2010 (Rp.)	TAHUN 2009 (Rp.)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	377.489.778,00
Pembayaran Pajak Pinjaman DN - Lainnya	76.666.234,00	10.229.590.539,00
Pembelian Pinjaman Kepada Pihak Negara	0,00	0,00
Pembelian Pinjaman Kepada Pihak Daerah	0,00	0,00
Pembelian Pinjaman Kepada Pihak Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	76.666.234,00	10.607.070.317,00
Arus Kas Berakumulasi dari Aktivitas Pembiayaan	(76.666.234,00)	(10.607.070.317,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPE)	70.936.621.270,00	65.410.902.389,01
Penerimaan Saldo UP Tahun 2009 dari Bendahara Pengeluaran	737.210.250,00	896.567.618,00
Jumlah Arus Masuk Kas	71.673.831.520,00	66.307.469.997,01
2. ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPE)	70.936.621.270,00	65.410.902.389,01
Pengeluaran UP Tahun 2010 yg masih berada di Bendahara Pengeluaran	457.807.234,00	737.210.250,00
Jumlah Arus Keluar Kas	71.394.428.494,00	66.148.112.639,01
Arus Kas Berakumulasi dari Aktivitas Non Anggaran	279.403.026,00	159.357.358,00
Kesimpulan/ Penerimaan Kas	(68.145.681.973,99)	(49.596.115.140,90)
Saldo Awal Kas di BUD	106.611.085.679,24	135.201.200.820,14
Saldo Akhir Kas di BUD (dan rekening Bantuan Grupa)	46.465.403.685,25	106.611.085.679,24
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	458.277.724,00	767.231.407,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.065.713,00	23.502.814,00
Saldo Akhir Kas	46.941.647.122,25	107.401.819.800,24

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

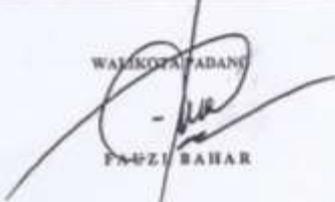


PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No	Uraian	Anggaran 2011 (Rp.)	Realisasi 2011 (Rp.)	%	Realisasi 2010 (Rp.)
I	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	104.377.000.000,00	102.412.470.200,00	98,14	77.039.340.554,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	26.325.514.278,00	23.497.002.851,00	79,43	21.985.780.440,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8.996.686.425,00	8.996.686.425,00	100,00	5.293.729.120,00
	Lain-lain PAD yang Sah	32.276.033.190,28	15.008.674.383,68	47,78	11.772.433.720,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	164.974.233.893,28	149.914.833.860,68	90,87	116.091.283.834,00
B	PENDAPATAN TRANSFER				
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERMIBANGKAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	34.003.440.408,00	42.217.597.527,00	115,20	64.983.332.757,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.043.138.800,00	1.084.707.873,00	103,79	428.143.989,00
	Dana Alokasi Umum	711.416.039.000,00	711.416.039.000,00	100,00	632.117.437.000,00
	Dana Alokasi Khusus	33.431.100.000,00	33.431.100.000,00	100,00	43.514.500.000,00
	Sub Jumlah	819.891.718.208,00	828.149.444.400,00	101,00	741.044.435.746,00
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
	Dana Penyetaraan	171.218.438.180,00	163.888.051.180,00	96,77	79.793.689.203,00
	Sub Jumlah	171.218.438.180,00	163.888.051.180,00	96,77	79.793.689.203,00
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.594.823.274,53	43.256.198.763,00	113,44	46.004.489.880,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	33.594.823.274,53	43.256.198.763,00	113,44	46.004.489.880,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.654.701.020.144,53	1.654.893.714.423,00	100,07	861.142.644.826,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	41.115.000.000,00	3.500.000.000,00	8,51	2.761.149.718,00
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	2.225.230.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	13.139.200.000,00	13.139.200.000,00	100,00	23.368.690.000,00
	DPCP dan PPD	0,00	0,00	0,00	22.195.116.586,00
	DPPSP	0,00	0,00	0,00	1.740.690.000,00
	DPPPO	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
	DPPFD	12.321.793.000,00	10.644.513.300,00	86,39	0,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	68.595.993.000,00	29.383.713.300,00	42,72	57.185.816.384,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.390.233.247.897,81	1.234.872.224.184,66	88,84	1.861.019.734.777,00
II	BELANJA				
A	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	836.622.177.842,28	838.390.208.327,00	96,41	773.001.463.938,00
	Belanja Barang	195.724.488.618,30	176.554.155.819,00	90,41	130.670.688.745,00
	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hibah	43.733.723.274,00	28.073.521.150,00	64,43	24.362.189.254,00
	Bantuan Sosial	37.807.515.088,00	15.789.243.260,00	41,77	13.168.399.800,00
	Bantuan Keuangan	746.963.981,00	746.963.981,00	100,00	79.188.412.181,00
	Jumlah	1.134.834.898.798,58	1.079.814.166.776,00	95,20	968.891.134.719,00
B	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	16.677.448.308,00	12.403.763.130,00	74,39	21.581.514.282,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	34.330.881.996,00	32.716.797.064,00	95,31	14.340.139.562,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	88.806.187.717,00	52.840.255.887,00	59,49	46.910.779.471,00
	Belanja Jalin, Irigasi dan Jaringan	43.483.873.347,20	42.857.988.398,00	98,56	49.021.362.109,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	172.036.790,00	153.289.950,00	89,11	201.509.600,00
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	131.040.000,00
	Jumlah	288.695.788.148,20	246.874.877.349,00	75,79	234.238.934.964,00
C	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	1.700.000.000,00	738.218.773,00	43,43	1.241.000.000,00
	Jumlah	1.700.000.000,00	738.218.773,00	43,43	1.241.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.321.834.998.947,58	1.285.246.176.899,00	97,26	1.196.268.139.523,00
III	TRANSFER				
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				

Uraian	Anggaran 2011 (Rp.)	Realisasi 2011 (Rp.)	%	Realisasi 2010 (Rp.)
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNJAH BELANJA & TRANSFER	1.221.820.299,247,00	1.190.246.174,209,00	97,39	1.190.246.174,209,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(41.999.211,249,25)	55.726.021,285,66	(122,94)	(65.248.424,741,99)
IV PEMBIAYAAN				
A PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	46.923.210,909,25	46.923.210,909,25	100,00	107.348.295,909,24
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	46.923.210,909,25	46.923.210,909,25	100,00	107.348.295,909,24
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pem. Daerah	3.324.899.000,00	3.324.899.200,00	100,00	0,00
Pinjaman Pokok Pinj. DN Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.860.214,00
Pinjaman Pokok Pinj. DN Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	3.324.899.000,00	3.324.899.200,00	100,00	16.860.214,00
PEMBIAYAAN NETTO	43.598.211,909,25	43.598.211,909,25	100,00	107.271.635.695,24
Dua Luluh Partisipasi Anggaran (SILPA)	0,00	97.324.243.174,91		46.722.210,909,25

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

PEMERINTAH KOTA PADANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

URAIAN	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2010 (Rp.)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI		
I. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pajak Daerah	102.412.436.200,00	77.639.340.256,00
Pendapatan Itribusi Daerah	23.497.002.851,00	21.985.780.440,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	8.996.686.425,00	5.293.729.120,00
Lain-lain P A D Yang Syah	15.008.674.985,66	11.772.433.730,95
Dana Bagi Hasil Pajak	62.217.597.527,00	64.985.332.757,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.084.707.973,00	426.165.989,00
Dana Alokasi Umum	711.416.050.000,00	632.117.457.000,00
Dana Alokasi Khusus	53.431.160.000,00	43.515.500.000,00
Dana Penyerahan	165.688.051.360,00	79.093.689.200,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.096.198.767,00	46.094.499.690,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	3.580.000.000,00	3.261.149.718,06
Pendapatan Dana Datarat	0,00	2.221.250.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi	15.139.200.000,00	22.268.690.000,00
DPOK dan PPD	0,00	22.190.116.586,00
DPSP	0,00	1.740.800.000,00
DPSPD	0,00	900.000.000,00
DPTD	10.644.513.300,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.236.672.228.184,66	1.640.819.734.777,81
II. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	806.590.208.325,00	753.001.463.928,00
Belanja Barang	176.954.133.819,00	130.670.689.746,00
Biaya	0,00	0,00
Sewa	0,00	0,00
Hibah	38.953.531.150,00	24.802.189.024,00
Bantuan Sosial	15.569.245.500,00	13.168.399.800,00
Bantuan Keuangan	746.965.981,00	39.188.412.181,00
Belanja Tak Terduga	759.016.773,00	5.241.090.800,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Itribusi	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.639.772.123.580,00	966.132.225.519,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	596.900.104.604,66	674.687.509.258,81
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
I. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Jalan, Jembatan dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
II. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	12.405.765.150,00	23.581.514.262,00
Belanja Peralatan dan Mesin	32.716.797.964,00	14.349.138.962,00
Belanja Gedung dan Bangunan	52.640.250.887,00	46.590.779.471,00
Belanja Jalan, Jembatan dan Jaringan	42.657.980.398,00	49.021.052.339,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	155.269.920,00	201.500.600,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	131.040.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	143.670.793.319,00	134.235.934.034,00
Arus Kas Bersih dari Akt. Invest. Aset Non Kes.	(143.670.793.319,00)	(134.235.934.034,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
I. ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Dana Cadangan	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2011 (Rp.)	TAHUN 2010 (Rp.)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Pinrang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.324.899.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DM - Lainnya	0,00	76.660.254,00
Pembelian Pinjaman Kepada Perush Negara	0,00	0,00
Pembelian Pinjaman Kepada Perush Daerah	0,00	0,00
Pembelian Pinjaman Kepada Perush Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.324.899.000,00	76.660.254,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(5.324.899.000,00)	(76.660.254,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.471.520.420,00	57.068.023.748,00
Penerimaan Setoran UP Tahun 2010 dan Bendahara Pengeluaran	457.807.224,00	337.230.230,00
Jumlah Arus Masuk Kas	18.929.327.644,00	57.405.253.978,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.794.240.720,00	57.068.023.748,00
Pengeluaran UP Tahun 2011 yg masih berada di Bendahara Pengeluaran	186.292.806,00	457.807.224,00
Jumlah Arus Keluar Kas	16.980.533.526,00	57.525.830.972,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1.948.794.118,00	279.403.006,00
Keselikan/Perubahan Kas	52.349.926.403,66	(90.145.681.973,99)
Saldo Awal Kas di BUD	46.465.403.683,25	306.611.085.609,24
Saldo Akhir Kas di BUD	98.815.330.086,91	46.465.403.683,25
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	186.814.634,00	458.377.724,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	382.111.872,00	33.965.713,00
Saldo Akhir Kas	99.394.356.594,91	46.941.647.123,25

WALIKOTAPADANG

FAUZI BAHAR

PEMERINTAH KOTA PADANG
NERACA DAERAH
 Per 31 Desember 2011 dan 2010

KELAS	REK	JAHIS (Rp.)	JAHIS 2011 (Rp.)	JAHIS 2010 (Rp.)	KETERANGAN	KOD	TAMBAHAN (Rp.)	TAMBAHAN (Rp.)
ASSET								
ASSET LANCAR								
Kas di Kas Daerah	1	78.814.420.812,00	46.444.284.100,00	478.500,00		21	3.071.801.571,00	478.500,00
Kas di Kas Swasta	2	1.109.453,25	1.109.453,25	0,00		20	4.000,00	0,00
Kas di Kas Syariah	3	184.814.474,00	494.371.724,00	3.130.303.482,42		22	3.130.303.482,42	3.130.303.482,42
Kas di Simpanan Penghasilan	4	302.111.872,00	17.903.713,00	0,00		23	3.298.453,00	3.130.303.482,42
Kas di Simpanan Program	5	20.000.000,00,00	0,00	0,00		24	4.814.871,871,00	4.814.871,871,00
Debitur	6	10.011.467.411,00	4.536.024.241,00	0,00				
Piutang Pajak	7	2.108.194.313,00	1.000.138.437,00	0,00				
Piutang Berhad	8	0,00	0,00	0,00				
Biaya Lancar Terutang (Gaji, Pajak, dan Lain-lain)	9	2.203.178.964,00	2.491.134.064,00	0,00		25	0,00	0,00
Piutang lainnya	10	11.694.004.131,00	9.390.749.131,00	0,00		26	0,00	0,00
Previdensi	11							
Jumlah Aktiva Lancar		178.083.474.818,79	64.096.237.348,85	4.815.274.429,42			4.815.274.429,42	4.815.274.429,42
INVESTASI JANGKA PANJANG								
INVESTASI JANGKA PANJANG								
Investasi lain Perseoran	11	3.214.160.000,00	3.134.130.000,00	0,00		31	83.234.302.176,45	83.234.302.176,45
Investasi Perseoran	12	22.207.240.000,00	20.542.450.000,00	0,00		32	384.133.872,00	17.964.113,00
Jumlah Investasi Jk. Panjang		25.421.400.000,00	24.676.580.000,00	0,00		33	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
ASSET TETAP								
Tanah	13	799.207.284.340,00	801.190.480.238,27	0,00		34	0,00	0,00
Peralatan dan Meubel	14	305.048.103.247,00	210.240.103.047,00	0,00		35	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	15	404.444.014.017,70	506.831.114.817,30	0,00			128.664.802.843,77	61.874.477.108,29
Jasa, Sifat, dan Jangjian	16	1.203.795.083.381,20	1.158.584.302.243,20	0,00				
Aset Tetap Lainnya	17	31.072.611.261,00	43.833.242.246,00	0,00				
Kontribusi dalam Perusahaan	18	15.273.643.837,00	16.549.233.270,00	0,00		36	24.061.400.000,00	24.061.400.000,00
Akumulasi Penyusutan	19	0,00	2.073.102.868.884,87	0,00		37	3.840.071.424.411,00	3.840.071.424.411,00
Jumlah Aset Tetap		3.640.814.024.811,00	3.070.102.868.884,87	0,00		38	3.840.071.424.411,00	3.840.071.424.411,00
Debitur	20	0,00	0,00	0,00				
Debitur Lainnya	21	0,00	0,00	0,00				
Jumlah Debitur		0,00	0,00	0,00				
ASSET LAINNYA								
Tertahan Ganti Rugi	21	478.141.832,00	0,00	0,00		41	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	22	803.277.180,00	0,00	0,00				
Aset Laba-Rugi	23	24.841.546.379,22	15.726.703.072,00	0,00				
Kontribusi dalam Perusahaan	24	81.468.500.000,00	0,00	0,00				
Jumlah Aset Lainnya		81.468.500.000,00	0,00	0,00				
TOTAL AKTIVA		3.141.963.215.362,16	2.942.860.298.196,21	4.815.274.429,42			3.141.963.215.362,16	3.141.963.215.362,16

W. J. PADANG
 FAUCI ABAB



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Uraian	Anggaran 2013 (Rp.)	Realisasi 2013 (Rp.)	%	Realisasi 2012 (Rp.)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	156.230.000.000,00	163.460.994.275,00	105,91	128.595.100.667,1
Pendapatan Retribusi Daerah	52.443.617.236,00	39.489.903.663,00	73,14	30.325.980.534,1
Pendapatan Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8.413.720.596,00	8.413.720.596,00	100,00	8.403.534.687,1
Lain-lain PAD yang Sah	21.798.421.712,00	25.585.331.042,23	117,37	22.126.224.183,1
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	238.885.759.534,00	236.871.896.576,23	99,99	189.450.846.075,2
PENDAPATAN TRANSFER				
1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	63.078.510.323,00	56.785.278.686,00	90,03	107.090.190.571,1
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.226.093.244,00	932.702.637,00	76,08	1.487.190.630,1
Dana Alokasi Umum	1.003.176.003.000,00	1.003.176.003.000,00	100,00	871.873.666.000,0
Dana Alokasi Khusus	81.841.800.000,00	81.841.800.000,00	100,00	64.122.760.000,0
Sub Jumlah	1.149.389.496.567,00	1.142.678.964.323,00	99,43	1.844.585.806.621,0
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINYA				
Dana Penyesuaian	266.418.834.000,00	264.220.977.000,00	99,18	174.062.662.000,0
Sub Jumlah	266.418.834.000,00	264.220.977.000,00	99,18	174.062.662.000,0
3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.978.019.900,00	62.612.507.000,00	85,80	66.970.621.266,0
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Sub Jumlah	72.978.019.900,00	62.612.507.000,00	85,80	66.970.621.266,0
Jumlah Pendapatan Transfer	1.488.639.396.467,00	1.469.509.448.323,00	98,71	1.285.639.109.889,0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	5.713.100.000,00	803.316.165,00	14,05	498.191.540,0
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,0
Bantuan Keuangan dari Provinsi	12.470.803.160,00	5.558.321.264,00	44,57	400.000.000,0
DPPID	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18.183.903.160,00	6.360.837.429,00	34,98	298.191.540,0
JUMLAH PENDAPATAN	1.745.533.053.161,00	1.714.742.182.328,23	98,22	1.475.988.121.513,2
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.143.450.129.431,37	1.026.104.829.458,00	89,74	942.725.514.364,00
Belanja Barang	302.765.283.162,74	247.850.159.033,00	81,86	190.333.083.440,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	39.613.740.000,00	40.037.332.500,00	101,07	40.067.890.030,00
Bantuan Sosial	17.993.033.085,00	13.065.060.000,00	72,60	5.197.881.800,00
Bantuan Keuangan	746.963.881,00	746.963.331,00	100,00	615.759.900,00
Jumlah	1.824.579.163.660,21	1.327.824.398.342,00	72,80	1.175.348.128.844,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	33.211.239.331,00	17.642.477.532,00	53,12	6.514.051.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	53.166.430.912,75	53.044.968.716,00	99,77	35.984.892.667,00
Belanja Gedung dan Bangunan	143.725.443.370,40	128.051.183.892,00	89,07	128.984.254.445,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.101.866.898,40	89.831.444.841,00	78,73	47.897.447.770,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	337.110.775,00	135.129.360,00	40,07	171.416.996,00
Belanja Aset Lainnya	1.149.415.200,00	904.153.000,00	78,66	438.459.935,00
Jumlah	247.499.524.597,55	289.618.261.401,00	117,05	219.990.523.613,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	3.700.000.000,00	2.142.971.200,00	57,92	881.744.630,23
Jumlah	3.700.000.000,00	2.142.971.200,00	57,92	881.744.630,23
JUMLAH BELANJA	1.875.768.690.217,56	1.619.577.687.943,00	86,34	1.493.112.397.084,23

Uraian	Anggaran 2013 (Rp.)	Realisasi 2013 (Rp.)	%	Realisasi 2012 (Rp.)
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.875.768.690.217,86	1.619.977.687.943,00	86,34	1.490.212.397.096,28
SURPLUS / (DEFISIT)	(130.035.637.056,86)	95.164.494.385,33	(73,18)	75.776.724.417,13
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sil.PA	164.307.317.444,02	164.307.317.444,02	100,00	97.284.593.026,91
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	164.307.317.444,02	164.307.317.444,02	100,00	97.284.593.026,91
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perm. Daerah	15.599.000.000,00	15.599.000.000,00	100,00	8.733.000.000,00
Pinj. Pokok Pinj. DN Lainnya	18.672.680.387,16	13.262.733.387,16	81,74	0,00
Pinj. Pokok Pinj. DN Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	34.271.680.387,16	30.861.733.387,16	90,05	8.733.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	130.035.637.056,86	133.445.604.056,86	102,62	88.551.853.026,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0,00)	228.610.098.442,09		164.307.317.444,02

WALIKOTA PADANG



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2012 (Rp.)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI		
1. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pajak Daerah	165.460.994.275,00	128.595.100.667,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.409.960.663,00	30.325.980.534,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	8.415.720.596,00	8.403.534.687,00
Lain-lain P A D Yang Syah	24.756.621.042,23	22.126.224.187,36
Dana Bagi Hasil Pajak	56.785.278.686,00	107.090.190.571,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	932.792.637,00	1.497.190.052,00
Dana Alokasi Umum	1.003.116.093.000,00	871.875.666.000,00
Dana Alokasi Khusus	81.841.800.000,00	64.122.760.000,00
Dana Penyesuaian	264.220.977.000,00	174.082.662.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.612.507.000,00	66.970.621.266,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Pendapatan Hibah	802.516.165,00	498.191.549,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.558.321.264,00	400.000.000,00
DPDF dan PPD	-	-
DPPIP	-	-
DPIPD	-	-
DPPID	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Pengembalian Belanja	3.640.183.482,00	4.854.477.896,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.717.553.765.810,23	1.480.842.599.409,36
2. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	1.027.526.981.095,00	946.791.764.967,00
Belanja Barang	250.068.000.878,00	190.994.677.058,00
Bunga	-	-
Subsidi	-	-
Hibah	40.057.332.500,00	40.118.912.800,00
Bantuan Sosial	13.065.069.000,00	5.236.581.000,00
Bantuan Keuangan	746.965.351,00	815.759.990,00
Belanja Tak Terduga	2.142.971.200,00	2.795.859.764,25
Bagi Hasil Pajak	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	1.333.607.320.024,00	1.186.753.555.579,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	383.946.445.786,23	294.089.043.830,11
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	828.600.000,00	-
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	828.600.000,00	-
2. ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	17.643.477.532,00	6.514.051.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	53.045.158.776,00	35.984.968.167,00
Belanja Gedung dan Bangunan	128.051.185.892,00	128.984.254.445,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.851.444.841,00	47.897.447.770,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	115.129.360,00	171.416.996,00
Belanja Aset Lainnya	904.155.000,00	438.459.935,00
Jumlah Arus Keluar Kas	289.610.551.401,00	219.990.599.113,00
Arus Kas Bersih dari Akt. Invest. Aset Non Keu.	(288.781.951.401,00)	(219.990.599.113,00)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
2. ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Periyertan Modal Pemerintah Daerah	15.599.000.000,00	8.753.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Penerimaan Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemda Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lemb. Keu. Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lemb. Keu. Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lainnya	15.262.713.387,16	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	30.861.713.387,16	8.753.000.000,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(30.861.713.387,16)	(8.753.000.000,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.547.106.288,00	71.788.733.246,00
Penerimaan Setoran UP Tahun 2012 dari Bendahara	-	-
Pengeluaran	190.889.043,00	146.542.638,00
Jumlah Arus Masuk Kas	67.357.995.331,00	71.935.275.894,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.547.106.288,00	71.788.733.246,00
Pengeluaran UP Tahun 2013 yang masih berada di Bendahara	-	-
Pengeluaran	971.784.496,00	190.889.043,00
Jumlah Arus Keluar Kas	68.518.890.784,00	71.979.622.289,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(780.895.453,00)	(44.346.405,00)
Kenaikan/ Penurunan Kas	63.521.885.545,07	65.301.898.312,11
Saldo Awal Kas di BUD	164.116.428.401,02	98.815.330.088,91
Saldo Akhir Kas di BUD	227.638.313.946,09	164.116.428.401,02
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	974.347.029,00	199.636.507,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.692.200,00	350.158.905,00
Saldo Akhir Kas	228.620.353.175,09	164.666.223.813,02

WALIKOTA PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
NERACA
 Per 31 Desember 2013 dan 2012

URAIAN	KEF	TAHUN 2013		TAHUN 2012		URAIAN	KEF	TAHUN 2011		TAHUN 2010	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)		
ASSET											
ASSET LANCAR						KEWAJIBAN					
Kas & Kas Setor	1	127.678.100.281,09	129.116.588.740,02			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Kas di Kas Setor	2	41.001,00	41.001,00			Utang Perhitungan Gaji Kerja	25		2.562.531,00		8.747.464,00
Kas di Bank	3	774.347.070,00	41.661,00			Utang Bunga	26		0,00		0,00
Kas di Bank Syariah	4	7.602.200,00	199.636.907,00			Utang Lain-lain	27		0,00		0,00
Kas di Perbankan Syariah	5	90.000.000.000,00	350.138.907,00			Utang Jangka Panjang Lainnya	28		1.018.106.704,00		178.646.000,00
Debitur	6	102.404.081.232,00	35.000.000.000,00			Kewajiban Keuangan	29		0,00		1.018.106.704,00
Piutang Pajak	7	4.041.112.453,13	32.268.551.662,00			Jumlah Kewajiban Jk. Pendek			1.018.106.704,00		1.178.478.772,33
Piutang Bersih	8	0,00	2.209.116.492,00								
Piutang Lain-lain	9	4.518.114.250,76	2.202.842.430,00			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Piutang Lainnya	10	12.877.684.879,98	14.138.162.000,00			Utang Dalam Negeri	30		6.327.704.753,31		6.327.704.753,31
Prisipal	11					Utang Jangka Panjang Lainnya	31		0,00		0,00
Jumlah Aktiva Lancar		412.550.833.998,98	178.152.296.429,84			Jumlah Kewajiban Jk. Panjang			6.327.704.753,31		6.327.704.753,31
INVESTASI JANGKA PANJANG						JUMLAH KEWAJIBAN			7.346.428.052,31		7.704.324.524,64
Investasi Non Perumahan	11	2.514.150.000,00	3.514.130.000,00			EKUITAS DANA					
Investasi Perumahan	12	42.093.313.844,10	31.170.249.000,43			EKUITAS DANA LANCAR					
Jumlah Investasi Jk. Panjang		46.606.367.844,10	34.684.249.000,43			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	32		228.610.000.442,00		164.207.311.444,00
ASSET TETAP						Perbaikan Jk. Disanggakan	33		1.600.100,00		250.138.000,00
Tanah	13	1.457.668.667.469,33	1.106.690.029.174,00			Cadangan Pemulihan	34		170.945.700.930,93		17.068.618.010,00
Pembangunan Mesin	14	291.220.446.817,61	381.811.274.264,00			Dana Jk. lra disalurkan s.d. Penyelesaian Utang Jk. Pendek	35		12.977.884.870,00		14.438.182.000,00
Obong dan Bangunan	15	1.263.692.920.032,70	614.093.313.612,50			Jumlah Ekuitas Dana Lancar			411.332.164.043,90		184.574.020.831,71
Jalan, Bangsal dan Bangunan	16	1.343.132.903.100,90	1.255.231.807.854,90			Disembankan dalam Investasi Jk. Panjang	37		46.911.485.848,10		24.624.499.000,43
Aset Tetap Lainnya	17	48.728.031.200,00	33.794.114.007,80			Disembankan dalam Aset Tetap	38		4.231.061.564.422,00		3.378.012.316.900,15
Kontribusi dalam Organisasi	18	29.698.310.644,00	33.794.114.007,80			Dana Jk. lra disalurkan s.d. Penyelesaian Utang Jk. Panjang	39		237.296.561.336,45		35.077.478.660,00
Akumulasi Penyusutan	19	0,00	65.892.946.821,60			Jumlah Ekuitas Dana Investasi	40		16.527.258.755,31		16.527.258.755,31
Jumlah Aset Tetap		4.831.061.965.424,03	3.578.014.216.898,13			Jumlah Ekuitas Dana			4.087.841.254.007,73		3.668.116.426.964,27
Dana Cadangan	20	0,00	0,00			EKUITAS DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	21	0,00	0,00			Disembankan dalam Dana Cadangan	41		0,00		0,00
Jumlah Ekuitas Cadangan		0,00	0,00			Jumlah Ekuitas Dana Cadangan			0,00		0,00
ASSET LABUNG						JUMLAH EKUITAS DANA			4.087.841.254.007,73		3.684.738.755,31
Tanah Ganti Rugi	22	423.201.000,00	279.201.000,00			TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA			8.434.273.306.260,04		8.393.063.281.296,62
Aset Tak Berwujud	23	176.201.635.281,45	1.892.472.095,00			TOTAL AKTIVA			5.226.920.846.794,93		3.867.908.182.298,62
Aset Lain-lain	24	24.809.030.000,00	1.416.858.914,00								
Kontribusi Dengan Pihak Ketiga			35.608.000.000,00								
Jumlah Aset Labung		227.296.561.336,45	89.097.470.000,00								

WALIKOTA PADANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 7878/UN35.1.7/PP/2014

17 November 2014

Lamp. : -

Hal : Observasi

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jl. Prof. Yamin SH No. 70
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penulisan Tugas Akhir, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Fitria Eka Sari**
BP/NIM : 2011/1109131
Program Studi : D3
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

bermaksud akan melakukan Observasi pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, mengenai : **LAPORAN KEUANGAN DARI TAHUN 2009-2013 PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.**

Sehubungan dengan itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Observasi dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.



.....n. Dekan
.....bantu Dekan I,

.....ris, M.Si
No. 19610703-198503-1-005



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang Jalan By. Pass KM. 18 Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :070.11. 2239 /Kesbang.Pol/2014

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat dari : PD I, Fakultas Ekonomi UNP Padang
Nomor : 7878/UN35.1.7/PP/2014 tanggal 17 November 2014
- b. Surat Pernyataan Penanggung jawab penelitian Ybs, tanggal 20 November 2014

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di Masyarakat Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : FITRIA EKA SARI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Baru, 20 April 1992
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Alamat di padang : Jl. Kakak Tua No.1B Padang
Maksud Penelitian : Penyelesaian Tugas Akhir
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : Laporan Keuangan dari Tahun 2009- 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
Tempat Penelitian : DPKA Kota Padang

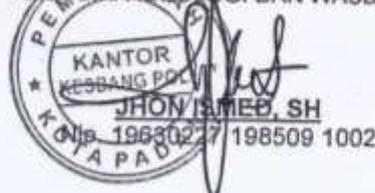
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/ Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 20 November 2014

AN.WALIKOTA PADANG
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KASUBINTELEKOMUNIKASI DAN WASBANG



Diteruskan kepada Yth:

1. PD I, Fakultas Ekonomi UNP Padang
2. Yang bersangkutan
3. Pertinggal.